



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 7 Desember 2016

Nomor : B/ 919/XII/2016/Srena  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : usulan sebagai Zona Integritas (ZI)  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  
(WBK).

Kepada  
Yth. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL  
POLRI  
di  
Jakarta

u.p. Dertipidkor Bareskrim Polri

1. Rujukan:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/322/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri.
2. Bersama ini diberitahukan kepada Direktur bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri merupakan salah satu target capaian pada Program kerja Kapolri "PROMOTER" untuk menjadi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2017. ✓
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Direktur untuk dapatnya mengusulkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kapolri untuk ditetapkan sebagai ZI menuju WBK dimaksud, dengan melampirkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit yang meliputi enam Area Perubahan Tahun 2016.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

ASISTEN KAPOLRI  
BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN  
SELAKU  
KELOMPOK UNIT PEMBANGUNAN ZI



DR. H. S. NARWIBOWO, S.H., M.Hum.  
DIREKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri
3. Irwasum Polri
4. Kabareskrim Polri.